



SOROTAN

May Day 2024, Jejak Perjalanan Aksi di Bandung

Berlindung di Balik Narasi Krisis, Adidas Perpanjang Praktik Eksploitatif

Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Industri Sawit Kalimantan Selatan

Pembentukan Pos Unit Kesehatan Kerja untuk Pekerja Rumahan di Kapuk Muara, Jakarta Utara

May Day 2024, Jejak Perjalanan Aksi di Bandung

Oleh: Zulfikar

May Day, hari yang biasanya disoroti dengan kegemerlapan iring-iringan dan seruan tuntutan dari pekerja yang berbaris di depan Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, menampilkan wajah yang berbeda di Kota Bandung tahun ini.

Biasanya, gedung-gedung tersebut riuh dengan langkah-langkah demonstran, namun kini mereka sepi. Namun demikian, semangat perjuangan tak pernah padam. Sebaliknya, terlihat sekelompok individu dan organisasi membentuk barisan panjang, menembus jalanan dengan langkah tegap. Mereka menempuh perjalanan sejauh dua kilometer dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat menuju Taman Cikapayang di Dago, mengusung aksi kampanye May Day 2024.

Kelompok tersebut merupakan perpaduan dari berbagai elemen masyarakat Bandung Raya: serikat



Massa Aksi Hari Buruh di Taman Cikapayang Dago. Foto: Aksara

"Kami sering diintimidasi saat hendak membentuk serikat pekerja di kampus. Upah yang layak dan jam kerja yang manusiawi menjadi impian yang jauh bagi kami, padahal ruangnya begitu luas," ungkap Enis, ketua Koperdja.

buruh, mahasiswa, pemuda, dan NGO. Di antaranya adalah Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Buruh Militan (Sebumi), komite persiapan Sindikasi, LION, LBH Bandung, Jerat Kerja Paksa, Safety, TURC, Tamansari Melawan, dan Forum Warga Dago Melawan, yang hadir sebagai suara bagi warga yang terancam penggusuran di kota ini.

Selain itu, perwakilan Sindikasi Bandung juga mempertanyakan kondisi buruk yang dialami pekerja kognitif. Mereka menyoroti bagaimana himpitan ekonomi memaksa mereka terjebak dalam pola hidup konsumtif, dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi semakin memperburuk situasi. "Kami, para

jurnalis dan penulis, dibayar per-artikel. Ada yang bahkan dibayar per-view, sehingga kami harus hidup dalam beban utang," ungkap Hendarto, perwakilan Sindikasi.

Forum Warga Dago Melawan juga mengungkapkan solidaritas dengan perjuangan pekerja, sambil menyuarakan ketakutan mereka akan ancaman penggusuran. "Mayoritas warga Dago adalah pekerja. Kami tidak merasa aman dengan ancaman penggusuran yang selalu mengintai," ungkap salah satu perwakilan.

Eva Eryani, seorang penyintas penggusuran Tamansari Bandung, juga memberikan kesaksian pahit. Dia menceritakan bagaimana penggusuran telah merampas kualitas hidup warga, membuat banyak dari mereka terpaksa berjuang dalam sektor informal untuk bertahan hidup.

Peringatan May Day tahun ini di Bandung menawarkan narasi yang berbeda. Lebih dari sekadar menyuarakan tuntutan di gedung-gedung pemerintahan yang sepi, mereka memilih mengisi ruang publik dengan semangat perjuangan. Ini adalah panggilan agar masyarakat sadar bahwa semangat perjuangan harus ada setiap saat, tidak hanya pada saat-saat tertentu.

BERLINDUNG DI BALIK NARASI KRISIS, ADIDAS PERPANJANG PRAKTIK EKSPLOITATIF



Oleh: Degina Adenesa

Praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap buruh alas kaki oleh industri brand sepatu ternama, Adidas kian masif terjadi. Sejak covid-19 diumumkan sebagai keadaan krisis di Indonesia, Adidas melalui PT Panarub Industry yang menjadi mitra produksi di Indonesia telah melakukan pemotongan upah pekerja serta memberhentikan ribuan pekerja secara sepihak.

Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Emelia Yanti Siahaan mengatakan berdasarkan hasil investigasi dan perhitungan serikat pekerja, PT Panarub setidaknya telah memotong upah buruh sebanyak dua kali selama masa pandemi yakni pada Juni-Juli dan Agustus-September 2020 dengan rata-rata pemotongan upah sebesar Rp800.000 hingga Rp1.300.000 pada dua periode tersebut.



“Kami meyakini, Panarub dan Adidas mengambil banyak keuntungan dari praktik melanggar hak-hak buruh,” ujar Emelia melansir Panditfootball.com dalam artikel Nestapa Buruh Pembuat Sepatu Adidas di Tengah Gemerlap Piala Dunia.

Di samping itu, PT Panarub terus menggalakkan gelombang PHK bagi para buruh. Bahkan pada pembukaan World Cup 2022, saat PT Panarub diberi kepercayaan untuk memproduksi sepatu untuk momen piala dunia, perusahaan tersebut melakukan pemberhentian kerja secara sepihak kepada 400 buruh. “Kenapa (dikatakan) PHK sepihak, karena Panarub melakukannya tidak sesuai tahapan, tidak ada pemberitahuan,” ujar perwakilan GSBI.

Lanjutnya, perusahaan dalam melakukan pemutusan kerja juga melakukan tindakan intimidasi dan memanfaatkan kerentanan buruh. “HRD (PT Panarub) bilang kalau ini surat ga di tanda tangan, nominal yang didapat akan jauh lebih rendah. (Buruh) nggak dikasih waktu 7 hari untuk memutuskan, langsung hari H, di PHK.” tambahnya.

Padahal, merujuk aturan tentang ketenagakerjaan pada Pasal 37 Ayat (3) jo menyebutkan "Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja."

Selain itu, Pasal 39 Ayat (1) PP. No 35 Tahun 2021 menyatakan "Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan."

Narasi manipulatif

Adidas dan PT Panarub Industry telah menggunakan alasan pandemi covid-19 sebagai dalih untuk melegitimasi tindakan semena-mena terhadap buruh. Parahnya, alasan tersebut tetap digunakan sebagai justifikasi walaupun status krisis pandemi telah dicabut dan keadaan kembali normal. Selanjutnya, untuk memperpanjang praktik eksploitatif terhadap buruh, perusahaan menggunakan ancaman resesi global yang katanya berdampak pada turunnya angka produksi mereka. Namun selama ini data terkait penurunan produksi maupun pengurangan order dari Adidas tidak pernah secara jujur dan transparan dibuka dalam meja perundingan bersama dengan Serikat Pekerja.

Mengutip data pemerintah yang dirilis Majalah Sedane, memperlihatkan ekspor pakaian dan aksesoris pakaian (HS61) tumbuh 19,4% (*year-on-year*), pakaian dan aksesoris non-rajutan (HS62) tumbuh 37,5%, dan alas kaki (HS64) tumbuh 41,1% per September 2022. The Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) mencatatkan rekor penjualan alas kaki (sepatu) di AS pada 2021 sebesar US\$100,7

miliar atau naik 20,5% year on year.

Bahkan dalam publikasi laporan resminya, Adidas menyebut bahwa perusahaannya berhasil menaikkan pendapatan sebanyak 1%, meningkatkan penjualan sebesar 6% atau € 22.511 juta selama periode 12 bulan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memperoleh € 21.234 juta keuntungan.

Melihat data yang ada, tentu klaim yang dilakukan PT Panarub terkesan manipulatif dan dikarang-karang. Terlebih, klaim tersebut tidak pernah disertakan dengan bukti yang valid dan transparan yang diberikan kepada buruh.

Lebih jauh GSBI mengungkapkan PHK sepihak yang digencarkan PT Panarub menjadi malapetaka bagi buruh yang tetap bekerja di pabrik. Mereka yang tetap bekerja kelimpahan beban tambahan untuk mengisi tugas rekan-rekannya yang terkena PHK. "Ini Panarub sampai hari ini masih lembur, ada videonya, semenjak ada PHK. PHK jalan terus, tapi lembur juga jalan terus."

Lanjutnya, "Karena PHK, kerjaan malah jadi keteteran. Orang ga ada, kerjaan banyak, malah jadi kayak kerja rodi. 1 orang bisa mengerjakan 2-3 proses di pabrik yang tadinya hanya mengerjakan 1 proses," jelasnya.

Selain pemotongan gaji dan PHK, buruh juga menuntut perusahaan untuk menghentikan praktik perampasan hak cuti yang dilakukan oleh PT Panarub yang mana perusahaan tersebut memaksa buruh untuk mengambil cuti tahunan. Pemaksaan cuti ini diindikasikan akan memperkuat justifikasi perusahaan untuk tidak membayar upah buruh. Praktik ini erat kaitannya dengan sistem No Work No Pay yang diatur dalam Pasal 93 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah atau kemauan perusahaan.

Regulasi Indonesia Melanggengkan Penderitaan Buruh

Sementara itu, ambisi kemajuan ekonomi yang digaungkan pemerintah Indonesia malah kian membawa kesengsaraan bagi kelas pekerja. Alih-alih melindungi kesejahteraan pekerja, regulasi yang diterbitkan pemerintah makin melanggengkan praktik eksploitasi buruh dengan memberi lampu hijau bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan upah yang kian memiskinkan buruh. Praktik ini justru menjebak buruh untuk bekerja lembur dengan jam kerja lebih panjang.

Untuk mencapai ambisi menjadi “negara berpendapatan tinggi” dalam waktu yang lebih cepat, Pemerintah Indonesia tidak segan-segan menyusun kerangka kebijakan neoliberal dengan mengutamakan investasi modal yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (baca: Cilaka Kerja). Aktivis buruh Nining Elitos mengutip Kompas.com menilai suara-suara penolakan dari masyarakat, mulai dari jalanan hingga jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi, tidak didengar. Bahkan, suara masyarakat dibungkam dengan surat telegram Kepala Polri yang menginstruksikan anggota kepolisian untuk melawan narasi anti-UU Cipta Kerja di masyarakat.

”Kekuasaan hari ini semakin culas dan mereka tidak butuh rakyat. Yang mereka butuhkan hanya investasi, tetapi mengorbankan aspek yang lebih besar, yaitu persoalan kemanusiaan yang adil dan sejahtera,” kata Nining.

Selain UU Cipta Kerja, regulasi lain yang sungguh menyengsarakan nasib buruh adalah Permenaker 5 tahun 2023. Secara ringkas, Permenaker tersebut berisi aturan tentang penyesuaian jam kerja dan penyesuaian upah pada industri padat karya.

Regulasi ini memuat pengurangan jam kerja buruh yang berimplikasi pada pengurangan upah buruh. Dengan menggunakan istilah pengurangan jam kerja, para pengusaha dengan leluasa menerapkan sistem no work no pay. Inti dari Permenaker ini adalah perusahaan dimungkinkan melakukan pemotongan upah sebesar 25% kepada pekerja yang bekerja di perusahaan dengan orientasi ekspor, meliputi garmen, tekstil, dan alas kaki dan lainnya.

Menurut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Permenaker ini seolah menjadi regulasi yang melegalkan kejahatan perusahaan terhadap buruh. “Belum lagi di daerah-daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di Brebes upah buruh cuma 2.018.000, kalau dipotong 25% cuma dapat 1,8 juta, sedangkan secara kebutuhan untuk bertahan hidup nggak jauh beda dengan yang di kota-kota besar. Faktanya harga kontrakan sama-sama aja, makan juga sama aja harganya.”

Anehnya, Kementerian Tenaga Kerja menetapkan aturan tersebut hanya akan berlaku bagi pekerja yang menyetujui. Sedangkan serikat pekerja yang menolak hal tersebut, tidak akan diterapkan dan bagi pekerja yang tidak berafiliasi dengan serikat secara otomatis akan mengikuti aturan tersebut. “Ini bahaya, nyasarnya akan kemana-mana, apalagi ke buruh yang ga berserikat yang mana jumlahnya lebih banyak dari yang berserikat.”

Tuntutan Koalisi CCC Indonesia

Merespons berbagai bentuk diskriminasi perusahaan dan ketidakpedulian pemerintah atas hal tersebut, Clean Clothes Coalition (CCC) Indonesia yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Konfederasi KASBI, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Garteks KSBSI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), dan Trade Union Rights Centre (TURC) telah bersepakat untuk



mendukung dan terlibat di dalam Kampanye “Pay Your Workers – Respect Labour Rights (PYW-RLR)”.

Secara garis besar, Koalisi CCC Indonesia menuntut kepada Adidas dan PT Panarub Industry sebagai mitra produksi adidas di Indonesia untuk, menghormati hak-hak dasar pekerja, membayar upah buruh yang telah dipotong pada masa pandemi covid-19 dan seterusnya, menuntut hak atas kepastian kerja menyusul masifnya gelombang PHK sepihak yang dilakukan, menghentikan perampasan hak atas cuti yang dilakukan PT Panarub demi menerapkan praktik No Work No Pay yang menyengsarakan buruh.

Direktur TURC, Andriko Otang mengatakan keterlibatan Koalisi CCC Indonesia di dalam kampanye Pay Your Workers – Respect Labour Rights melalui seluruh rangkaian tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas serikat pekerja dalam mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak dasar yang dialami oleh para pekerja dan anggotanya. Aktif terlibat menyuarakan berbagai masalah tersebut melalui advokasi kampanye, dan mendesak Adidas dan PT. Panarub untuk duduk bersama di meja perundingan.

“Melalui kampanye ini kami berusaha membangun tekanan publik yang lebih luas, menyuarakan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja seperti yang di alami oleh para pekerja di PT. Panarub. Kami mendesak agar Adidas bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak-hak dasar tenaga kerja, duduk bersama di meja perundingan, dan menyepakati perjanjian atas penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja yang bekerja di perusahaan mitra produksi pada rantai pasok mereka.” ujarnya.

Sumber:

<https://majalahsedane.org/tenaga-tak-dibayar-buruh-pembuat-pakaian-dan-sepatu-piala-dunia-2022/>
<https://www.google.com/url?q=https://majalahsedane.org/no-work-no-pay-buruh-ditumbalkan-untuk-resesi-global/&sa=D&source=docs&ust=1680775236953989&usg=AOvVaw3606W-Avt-ngYEZTTMCgGvhttps://www.google.com/url?q=https://mahardhika.org/cerita-harian-pekerja-di-balik-gemerlap-world-cup-2022/&sa=D&source=docs&ust=1680775236954193&usg=AOvVaw3jyp6awJpJzRnYwXuemj9T>
https://www.google.com/url?q=https://www.panditfootball.com/berita/215001//221123/nestapa-buruh-pembuat-sepatu-adidas-di-tengah-gemerlap-piala-dunia&sa=D&source=docs&ust=1680775236954313&usg=AOvVaw1C6UOWcm3HYS7OIFn4J4_S
<https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2023/adidas-provides-top-and-bottom-line-outlook-2023/>

Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Industri Sawit Kalimantan Selatan



Batulicin, Kalimantan Selatan, 26 Mei 2024 – Dalam upaya mengatasi dan mencegah kasus kekerasan seksual di industri sawit, TURC melaksanakan workshop bertema "Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Industri Sawit" selama tiga hari, mulai dari 24 hingga 26 Mei 2024, di Hotel Ebony,

Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Workshop ini sendiri bertujuan untuk mendorong pembentukan satgas baru di setiap serikat buruh tingkat PUK, meningkatkan pengetahuan satgas baru tentang kekerasan seksual di dunia kerja, meningkatkan keterampilan satgas dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus

kekerasan seksual. Acara ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan dari lima federasi serikat buruh anggota Aliansi Serbusaka Kalimantan Selatan, yaitu FSP Minamas AP, FSP Minamas ASD, FSPM Sinarmas, FSP SPP-SPSI Sinarmas, dan FSP-BUN Rajalawi EHP.

Siti Mazumah, Koordinator Forum Pengada Layanan bagi

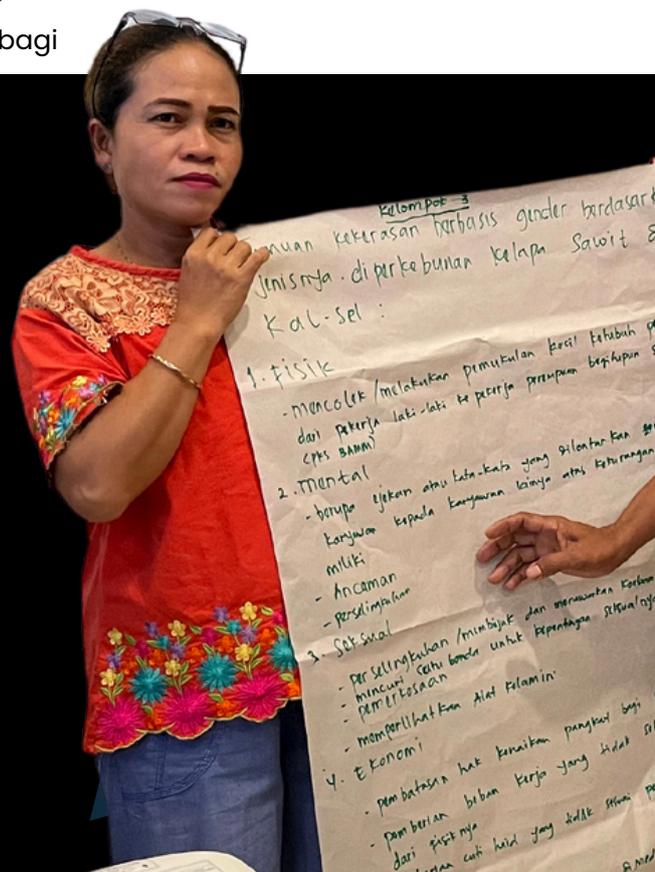
Perempuan Korban Kekerasan (FPL) dan advokat, perwakilan anggota Satuan Tugas (Satgas) dari federasi serikat buruh, dan perwakilan dari Trade Union Rights Centre (TURC) hadir sebagai narasumber dalam workshop.

Siti Mazumah menyatakan harapannya agar workshop ini dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus

kekerasan seksual di industri sawit. "Dengan adanya Satgas yang terlatih dan berpengetahuan, kita berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi semua pekerja," ujar Siti.

Partisipan workshop juga menyatakan optimisme mereka terhadap perubahan yang bisa diwujudkan. "Kami kini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Ini adalah langkah besar bagi kami dan komunitas buruh sawit," kata salah satu peserta dari FSPM Sinarmas.

Dengan kolaborasi antara serikat buruh, organisasi advokasi, dan Satgas, diharapkan kasus kekerasan seksual di industri sawit dapat diminimalisir, serta para korban mendapatkan penanganan dan pemulihan yang layak. Workshop ini menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual di sektor sawit Kalimantan Selatan.



Kelompok 3
 ... kekerasan berbasis gender berdasarkan jenisnya di perkebunan kelapa sawit & Kal-Sel :

1. Fisik
 - mencolek/melakukan pemukulan kecil ketubuh dari pekerja laki-laki ke pekerja perempuan berpupuk (PWS BAWMI)
2. Mental
 - berupa ejekan atau kata-kata yang dilontarkan ke karyawan kepada karyawan lainnya atau keluarganya
 - Ancaman
 - Persepsi
3. Seksual
 - Persepsi/kegiatan/minibate dan ancaman korban
 - intimidasi
 - pelecehan
 - memperlakukan Alat Pelamin
4. Ekonomi
 - pembatasan hak kenaikan pangkat bagi
 - pemberian beban kerja yang tidak
 - dari fisik nya
 - atau cara kerja yang tidak sesuai

Global Campaign School Live Session 3

Jakarta, 13 Mei 2024



Selama 1,5 tahun, Koalisi CCC Indonesia telah bekerja tanpa lelah melalui kampanye #PayYourWorkers - Respect Labor Rights. Dengan kreativitas, kami telah mengangkat suara buruh dan mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak di pabrik-pabrik. Namun, perjalanan ini belum selesai. Senin, 13 Mei 2024, menandai sesi terakhir dari Global Campaign School. Sesi ini menjadi momen penting untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan pengurus serikat pekerja agar lebih aktif dalam kampanye.

Pelatihan Psychological First Aid Staff TURC

Jakarta, 16-17 Mei 2024



Pada 16-17 Mei 2024 staff TURC mengikuti Pelatihan Bantuan Psikologi pada Pertolongan Pertama (Psychological First Aid). Pelatihan ini dilakukan karena TURC berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas staffnya dalam memahami isu-isu buruh yang berkembang dan memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang advokasi perburuhan.



Pembentukan Pos Unit Kesehatan Kerja untuk Pekerja Rumahan di Kapuk Muara, Jakarta Utara

Jakarta Utara, 20 Mei 2024 – Upaya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pekerja rumahan di Kapuk Muara, Jakarta Utara, berhasil diwujudkan dengan pembentukan Pos Unit Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang diresmikan pada hari Senin, 20 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan hasil dari diskusi publik antara Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Persatuan Dokter Okupasi Indonesia (PERDOKI), dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Layanan Kesehatan Bagi Pekerja Rumahan

Pembentukan Pos UKK di Kapuk Muara bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi pekerja rumahan, yang selama ini bekerja dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan.

Pos UKK diharapkan dapat memberikan edukasi promotif dan preventif, serta layanan kuratif dan rehabilitatif yang diperlukan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pendataan pekerja rumahan dan penyuluhan mengenai pentingnya K3 untuk meningkatkan kesadaran para pekerja akan manfaat Pos UKK.



Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder yang berperan penting dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Puskesmas Kelurahan Kapuk Muara, dan 30 orang pekerja rumahan.

Dalam sambutannya, dr. Bonnie Medana Pahlavie dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyampaikan pentingnya peran Pos UKK dalam memberikan layanan kesehatan bagi pekerja rumahan yang sering terabaikan.

Sejumlah sesi penyuluhan kesehatan juga digelar untuk para pekerja rumahan dan keluarga mereka. dr. Bonnie Medana Pahlavie juga memberikan informasi tentang bahaya kesehatan akibat penggunaan bahan kimia seperti lem dan zat berbahaya lainnya, yang sering digunakan oleh pekerja rumahan dalam produksi alas kaki.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya ergonomi untuk mencegah masalah kesehatan tulang dan otot.

Keberadaan Pos UKK ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kondisi kesehatan para pekerja rumahan yang selama ini bekerja dalam situasi yang tidak mendukung kesehatan mereka.

Selain itu, pembentukan Pos UKK juga diharapkan dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak untuk terus memantau dan meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di wilayah tersebut.

Pembentukan Pos Unit Kesehatan Kerja di Kapuk Muara, Jakarta Utara, menandai langkah penting dalam upaya memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja rumahan. Dengan dukungan penuh dari berbagai stakeholder, diharapkan Pos UKK ini dapat menjadi model yang efektif dalam melindungi kesehatan pekerja rumahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

LEMBUR

Lembar Buruh The official monthly newsletter by TURC

TERIMA KASIH



Hi Workers! Terima kasih banyak telah berlangganan E-Newsletter kami. Kami sangat senang workers menjadi bagian dari kami. Kami akan mengirimkan informasi penting berikutnya, kami juga berkomitmen untuk menerima dan mendistribusikan informasi atau konten berharga dari workers! Silahkan kirimkan melalui email: info@turc.or.id

Kami harap workers menikmati menjadi bagian dari e-newsletter kami!



Jl. Komp.Batan No.1 Blok E
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520
Phone : (+62) 8118696954
Email : admin@turc.or.id
Website : www.turc.or.id

 www.turc.or.id

 Trade Union Rights Centre

 [turc_id](https://www.instagram.com/turc_id)

 [turc_id](https://twitter.com/turc_id)